

# PASCAMODERNISME DAN DILEMA ISLAM INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

## Motto:

*“Maka hadapkanlah wajahmu kepada Agama itu secara ḥanīf, sesuai dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang tegak-lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui,” (Q 30:30).*

Sudah sejak Giovanni Pico della Mirandola, seorang filsuf zaman Renaisans, mulai merasakan perlawanan yang sengit dari gereja terhadap pandangan kemanusiaannya yang ia katakan ia pelajari dari seorang Muslim bernama Abdala (*‘Abd-Allāh*).<sup>1</sup> Memang

---

<sup>1</sup> Giovanni Pico della Mirandola adalah salah seorang pemikir humanis terkemuka zaman Renaisans Eropa. Ia mengucapkan sebuah orasi ilmiah tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja, dan ia membuka orasinya itu dengan kalimat: “I have read in the records of Arabians, reverend Fathers, that Abdala (*‘Abd-Allāh*) the Saracen, when questioned as to what on this stage of the world, as it were, could be seen most worthy of wonder, replied: ‘There is nothing to be seen more wonderful than man.’ In agreement with this opinion is the saying of Hermes Trismegistus: ‘A great miracle, Asclepius, is man,’” (Ernst Cassirer, et. al., penyunting, *The Renaissance Philosophy of Man* (Chicago: The University of Chicago Press, 1948), h. 223). Menurut Paul Oskar Kristeller dalam buku itu, kemungkinan *‘Abd-Allāh* itu adalah keluarga Nabi. Boleh jadi dia adalah salah seorang tokoh Syi’ah seperti ‘Abd-Allah ibn Ja’far al-Shadiq atau ‘Abd-Allah al-Mahdi yang pernah menjadi Khalifah di Maghrib (909-934 M).

masalah humanisme di Barat tidak pernah sepenuhnya bebas dari polemik dan kontroversi. Maka zaman modern yang merupakan hasil masa Renaisans kemudian masa Pencerahan (*Englightenment, Aufklarung*) ini, humanisme Barat lepas dari agama dan merupakan bagian integral dari sekularisme. Lalu terakhir ini muncul gagasan-gagasan pascamodern, suatu kritik kepada modernitas. Pascamodernisme tumbuh lebih-lebih di kalangan bangsa-bangsa Barat sendiri, sehingga pada hakikatnya ia merupakan suatu bentuk otokritik di bidang pemikiran kemanusiaan atau humaniora. Harus diakui bahwa budaya Barat, sebagaimana orang Barat sering mengakuinya, adalah sebuah budaya yang selalu terbuka untuk otokritik dan eksperimentasi. Argumen ini sering dikemukakan pada tataran sistem politik, yaitu demokrasi, sebuah sistem politik yang mampu mengoreksi diri sendiri, disebabkan sifatnya sebagai ideologi yang berujung terbuka (*“open-ended”*). Karena itu agaknya orang akan mampu mengkritik budaya modern Barat, jadi termasuk akan mampu berpikir dalam kerangka pascamodernisme, kalau ia sudah menjadi modern sendiri, atau sudah ikut serta sepenuhnya dalam budaya modern. Ini tentu berarti bahwa yang mampu melakukannya ialah mereka yang berasal dari masyarakat modern sendiri, yaitu kalangan orang-orang Barat. Maka, dari sudut pandang itu pembicaraan tentang pascamodernisme oleh seseorang dari kalangan kita, bangsa Indonesia — suatu bangsa yang masih terhitung terkebelakang, biar pun menurut ukuran lingkungannya sendiri di Asia Timur — akan mengundang pertanyaan segi otentisitasnya. Tapi itu tidak perlu mengecilkan hati kita, karena di Indonesia yang secara keseluruhan masih terkebelakang ini sudah ada sektor-sektor kehidupan modern dengan partisipan yang substansial. Para partisipan itu hidup dalam suasana budaya yang lebih kosmopolit, sehingga mereka menjumpai titik-temu yang lebih besar dengan pola budaya dunia yang dominan, yaitu Barat. Mereka adalah orang-orang Indonesia modern, jika tidak dalam mentalitasnya maka dalam fakta kehidupan materialnya.

Dari sinilah kita melihat segi dilematis Indonesia untuk masa depan. Sebab Indonesia adalah sebuah masyarakat dengan mozaik yang belum semuanya tertata rapi dan serasi, setara dan sepadan. Keberhasilan dalam membangun rasa kebangsaan, yang antara lain ditunjang oleh keberhasilan mengembangkan bahasa nasional, telah mewujudkan nyata dalam negara kesatuan yang cukup kukuh, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke seperti dari London sampai Teheran, dan mencakup pulau-pulau yang jumlahnya belasan ribu. Suatu prestasi yang luar biasa. Apalagi keanekaragaman itu diapresiasi secara positif, dan dibingkai dalam *motto* Bhinneka Tunggal Ika, suatu dasar yang kuat bagi paham kemajemukan masyarakat (kebetulan *motto* itu, lepas bagaimana dahulu ditemukan atau diciptakan, mirip sekali dengan *motto* Amerika Serikat “*E Pluribus Unum*” dan memiliki makna yang identik).

Tetapi keanekaragaman juga dapat menjadi sumber kerawanan. Dilihat dari segi tingkat perkembangan komponen-komponen bangsa, negeri kita mencakup komponen-komponen yang — meminjam istilah Alfin Toffler — sudah masuk gelombang ketiga (abad informatika, dengan indikasi lahiriah penggunaan peralatan elektronik untuk komunikasi dan memperoleh serta mengumpulkan informasi), sebagaimana juga sebelum itu sudah ada yang masuk dalam gelombang kedua (masyarakat industrial). Namun jumlah mereka sedikit sekali. Secara keseluruhan masyarakat Indonesia masih berpola budaya agraris yang refleksinya dalam budaya politik nasional sangat kuat dirasakan semua orang. Jadi masih berada dalam gelombang pertama, dan masih pada tingkat sedikit saja di atas garis tingkat perkembangan masyarakat Sumeria 5.000 tahun yang lalu (bangsa Sumeria adalah “penemu” peradaban, perintis abad pertanian). Lebih dari itu, untuk kita insafi bersama, dari kalangan bangsa kita masih cukup banyak komponen kemasyarakatan yang bahkan belum memasuki gelombang pertama, alias belum mengenal sistem pertanian teratur menurut budaya agraris. Jadi masih dalam tahap perkembangan “pra-gelombang”, jika istilah itu dapat dibenarkan.

Karena itu bagi Indonesia memang ada dilema berkenaan dengan adanya arus kesadaran baru internasional, yaitu pascamodernisme. Suatu bangsa yang belum sepenuhnya mengalami proses modernisasi dihadapkan kepada kemungkinan melihat atau malah menerapkan tahap sesudahnya, tahap pasca modern. Tapi ini mungkin tidak dapat dihindari. Bukan karena bangsa Indonesia harus meloncat dari tahap agraris (kondisi Indonesia sekarang ini secara keseluruhan) ke tahap pascamodern, tapi karena Indonesia tidak lain adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pergaulan global. Seperti kata orang, dunia sedang menuju kepada pola hubungan antarmanusia menurut gaya paguyuban sebuah “desa buwana” (*global village*). Kita ketahui bahwa ini adalah akibat ciri kemajuan teknologi, yang menghasilkan kemudahan luar biasa dalam komunikasi dan transportasi. Karena globalisasi itu, kita tidak perlu berkhayal akan mampu mengisolasi diri. Mau tidak mau kita terjerat dalam jaringan komunikasi dan informasi yang menguasai jagad, dan kita harus berbuat sebisa-bisanya: *pertama*, untuk bertahan; *kedua*, untuk menyesuaikan diri, justru agar dapat bertahan itu.

### Pascamodernisme sebagai Kritik<sup>2</sup>

Tadi telah dikatakan bahwa pascamodernisme adalah kritik orang modern terhadap modernitas. Atau, dalam ungkapan yang lebih kuat, kritik orang Barat terhadap kebudayaan Barat. Karena kebudayaan Barat itu telah sedemikian dominannya di bumi sehingga tidak satu pun segmen masyarakat manusia yang tidak terkena dampaknya, maka kritik terhadapnya adalah sebenarnya relevan untuk semua umat manusia, tidak terbatas hanya untuk orang-orang Barat sendiri. Lebih-lebih jika dibalik kritik itu terselip

---

<sup>2</sup> Bagian dari pembahasan berikut dibuat berdasarkan uraian Karlis Racevskis dalam *Postmodernism and the Search for Enlightenment* (Charlottesville: The University Press of Virginia, 1993), h. 65-78.

harapan bahwa suatu perbaikan akan terjadi, sehingga segi-segi negatif dari kebudayaan Barat — yang segi negatif itu telah banyak menjadi bahan retorika kaum agamawan, budayawan, dan politisi — dapat dikurangi, jika tidak dihilangkan.

Sayangnya, pascamodernisme sebagai kritik tidak hanya memberi harapan, tapi juga sering terasa tampil dengan gaya apokaliptik dan kataklismik yang mengancam. Budaya manusia akan hancur! Dunia akan segera kiamat! Begitu kira-kira jika bombasme diizinkan ikut mewarnai diskursus tentang pascamodernisme.

The paradigm of Western thought known as modernity is unraveling. In fact, modernity has been unraveling for some time, but signs of the disintegration have been especially noticeable of late and can be observed in almost all areas of intellectual and artistic activity. ....its dissolution was made inevitable by a flaw attributable to its very core and essence.<sup>3</sup>

Tapi justru karena segi negatifnya itu — segi yang dapat membuat orang putus harapan — maka diskursus tentang pascamodernisme, sejauh ia benar akan menyangkut manusia sejagad dan menentukan nasib mereka, tidak boleh dibatasi hanya pada kalangan kaum Barat saja. Pascamodernisme sendiri mengandung bibit ke arah kemungkinan dibukanya dialog yang benar-benar mondial, dan ini adalah segi positifnya yang memberi harapan. Karena ada kekhawatiran terhadap adanya kungkungan struktural bagi diskursus-diskursus, sehingga diskursus oleh kalangan Barat pun akan tidak mungkin, atau sulit sekali, lepas dari konteks budaya mapan mereka sendiri, maka dialog tentang pascamodernisme tidak dapat diizinkan berkembang menjadi dialog tertutup. Bagaimana caranya seseorang dari suatu pola budaya tertentu dapat menjadi “orang lain”? Tentu sulit sekali. Keperluan mengikutkan semua unsur penduduk bumi itu lebih-lebih dirasakan jika memang dalam

<sup>3</sup> Racevskis, *op. cit.*, h. 1.

pascamodernisme terselip bibit penghargaan kepada pandangan-pandangan hidup perennial yang kini mulai banyak mewarnai berbagai renungan serius kaum intelektual dunia.

Perennialisme adalah juga primordialisme (dalam arti positif), karena ia berarti keyakinan bahwa sesungguhnya manusia, di mana saja dan kapan saja, membawa dalam dirinya sejak dilahirkan, bahkan mungkin sejak sebelum itu, potensi kebaikan yang sama dan kemungkinan pencerahan yang sama. Potensi ini selalu ada secara abadi, maka disebut perennial. Dan atas dasar keyakinan tentang potensi perennial itu kita dapat sepenuhnya dibenarkan untuk berbicara mengenai adanya Kemanusiaan Semesta. Dari sudut ini, harapan kepada pascamodernisme dikukuhkan oleh adanya fasilitas komunikasi dan transportasi, sehingga ada alasan untuk memandang bahwa pascamodernisme adalah kelanjutan wajar kemajuan teknologi itu sendiri.

Sasaran utama kritik pascamodernisme ialah rasio yang merupakan buah terpenting tanaman Zaman Pencerahan (*Enlightenment, Aufklärung*) di Eropa Barat. Rasio adalah “mesin” modernitas. Namun sekarang, pada tahap perkembangan manusia modern mutakhir, rasio telah terbukti secara fundamental tidak memadai. Lebih-lebih karena rasio itu tampak berpusat pada dirinya sendiri (*self-centered*) dan tak punya dasar kuat karena keabsahannya terbukti hanya bersandar kepada klaim tentang dirinya sebagai sangat kukuh. Sekarang timbul kesadaran bahwa rasio tidak pernah merupakan penafsir universal dan obyektif tentang kenyataan seperti dikemukakan oleh para tokoh Pencerahan. Pada waktu orang sangat bergairah dengan rasio di zaman Pencerahan itu, mereka lupa bahwa rasio selalu memerlukan dukungan sistem kekuasaan dan pelembagaan yang diciptakannya sendiri. Maka cita-cita yang dikembangkan oleh Pencerahan itu dari semula sudah rawan terhadap kooptasi oleh kepentingan-kepentingan sosial-ekonomi, dan rasio dapat berkembang menjadi hak prerogatif kelas, ras, jenis, atau bangsa — yaitu suatu lingkungan kepentingan politik dan ekonomi yang terbatas, yang berusaha mewujudkan tujuannya sendiri seolah-olah

tujuan itu suatu nilai kemanusiaan yang abadi dan sejati. Padahal hakikatnya ialah tidak lebih daripada kepentingan-kepentingan lingkungan terbatas itu sendiri.

Karena kita tampaknya sudah mencapai tahap perkembangan yang sampai di situ pretensi tersebut di atas tidak lagi mempan, sebagian dari rame-rame pascamodernisme sekarang ini jelas dapat dikaitkan dengan kesadaran bahwa pandangan tentang pengertian jalan sejarah dalam kerangka suatu ide tentang *Aufklärung*, kemenangan oleh rasio dengan mengalahkan sisa-sisa pengetahuan yang bersifat mitos telah kehilangan keabsahannya. Sebab demistifikasi menurut ideologi *Aufklärung* ternyata merupakan mitos sendiri. Tujuan akhir rasio Pencerahan, yang antara lain untuk membuat masyarakat menjadi transparan kepada dirinya, dengan begitu sekarang terungkap merupakan ilusi belaka. Yang membuat kita mengalami jalan buntu ini ialah kegagalan untuk memperhitungkan kekuasaan — suatu unsur amat penting yang melengkapi dan bersaing dengan rasio. Rasio tidak mampu menjamin keutuhan tujuan Pencerahan karena ia tidak dapat mengendalikan bekerjanya kekuasaan. Lebih buruk lagi, rasio itu hanya mengabdikan untuk memudahkan beroperasinya kekuasaan dengan membantu mempertahankan kedok humanisme yang nyaman dan menyenangkan.

Karena ilusi yang telah bertindak sebagai pendukung rasa percaya diri pemikiran modern telah menguap, maka yang tersisa ialah kontradiksi yang menjadi ciri masyarakat modern. Secara khusus kritik pascamodern membuat kita sadar bahwa peradaban Barat telah menjadi tempat bagi kontradiksi yang besar antara nilai-nilainya dan politiknya, antara filsafat dan tindakannya, antara keyakinan persamaan manusianya di hadapan hukum dengan aktualitas ketidaksamaan di hadapan kenyataan. Berkenaan dengan warisan Pencerahan, kesadaran serupa itu tidak-bisa-tidak melahirkan keinsafan bahwa tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang selama ini sangat sentral bagi peradaban Eropa Barat tidak lagi dapat dianggap universal, dan bahwa proyek modernitas yang terkait dengan itu tidak dapat dirampungkan,

karena perampungan itu menjadi tidak masuk akal dan nilainya sendiri dipertanyakan.

Pada waktu yang sama, penanyaan kembali tentang nilai modernitas ini penuh dengan kesulitan yang asasi: semakin pascamodernisme melakukan penanyaan-penanyaan, semakin pula ia insaf tentang ketergantungannya kepada sasaran yang dikritiknya itu, yaitu modernitas itu sendiri. Karena itu, salah satu ciri penting pendekatan kritis pascamodernisme ialah ketidakjelasan yang diperlihatkannya berhadapan dengan modernitas. Strateginya tidak dapat lain kecuali suatu kritik dengan keikutsertaan dalam kesalahan itu sendiri, karena pascamodernisme tidak dapat sepenuhnya bersikap meragukan modernitas tanpa melepaskan sifat dan asal-usulnya sendiri — suatu “silsilah” yang membuat pascamodernisme itu bagian integral dari sejarah dan evolusi modernitas sendiri. Jadi dorongan jiwa kritis pascamodernisme berujung pada kesadarannya sendiri sebagai suatu sempalan dalam modernitas, sebagai suatu imbalan kritis terhadap keteguhan percaya diri modernitas, suatu imbalan pengaruh yang menghambat dan dengan penuh kemauan memperlemah aktivisme modernitas yang agresif dan kolonialistik.

Berkenaan dengan ini, Michel Foucault adalah yang pertama menangkap dengan meyakinkan dilema kritik pascamodern terhadap Pencerahan. Barangkali lebih daripada siapa pun, Foucault mampu memahami kemestian paradoksal dalam penjabaran suatu kritik tentang jalan pikiran yang justru memberi konfigurasi aksiologisnya kepada kemampuan kita untuk melancarkan kritik. Kesadaran tentang ketergantungan kritis kita ini juga mengetengahkan perlunya mempertanyakan alasan penanyaan kita sendiri tentang rasio Pencerahan: Apa jenis rasio yang kita gunakan? Apa pengaruhnya dalam sejarah yang lalu? Apa batasnya, dan apa pula bahayanya? Bagaimana kita dapat tampil sebagai makhluk rasional, yang beruntung meyakini perlunya bertindak atas dasar rasio, namun yang tidak beruntung karena bertindak rasional itu penuh dengan jebakan-jebakan bahaya yang nyata?



Lebih jauh, Foucault juga menunjukkan bahwa pertimbangan apa pun tentang Pencerahan menuntut agar kita semua sekarang ini tidak saja mengenali utang budi kita kepada etos Zaman Pencerahan tapi kita juga harus mengakui relevansinya yang tetap berlanjut bagi keperluan kita saat ini. Di atas semuanya Foucault mengakui adanya dampak yang pasti yang telah dan akan terus diberikan oleh pemikiran Pencerahan kepada pandangan Barat. Baginya tampak bahwa Pencerahan itu, baik dipandang sebagai kejadian tunggal yang mengabsahkan modernitas ataupun sebagai proses permanen yang menyatakan dirinya dalam sejarah penggunaan rasio, juga dalam ia mengembangkan dan mengembalikan bentuk-bentuk rasionalitas dan teknik, dalam otonomi dan otoritas ilmu, tidaklah sekadar sebuah episode dalam sejarah pemikiran. Ia merupakan pertanyaan kefilosafatan yang diukir sejak abad ke-18 dalam pemikiran Barat. Ia adalah segi modernitas yang perlu selalu dipersoalkan dengan cara membedakan dengan jelas sifatnya sebagai peristiwa tunggal dalam sejarah dari daya tarik universal muatan ideologisnya. Karena itu Foucault percaya bahwa persoalannya bukanlah memelihara sisa-sisa Pencerahan. Yang harus selalu diingat dan terus dipikirkan ialah penanyaan kembali kajadian zaman Pencerahan itu sendiri dan apa maknanya, suatu penanyaan kembali mengenai keabsahan historis tentang pemikiran universal.

Menurut Foucault, untuk memahami makna Pencerahan sekarang ini, pertama-tama perlu memisahkannya dari tema-tema humanisme yang selalu dikaitkan dengan Pencerahan itu sejak abad ke-19. Berarti, pertanyaan kritis hari ini harus diubah menjadi sesuatu yang positif, yaitu pertanyaan: dalam apa yang diyakini sebagai universal, berkemestian, dan wajib itu di mana letak bagi adanya segi-segi yang singular, nisbi, dan merupakan hasil pertimbangan sewenang-wenang? Dengan begitu maka diharap tercegah dari persoalan pro-kontra Pencerahan. Sikap pro-kontra yang merupakan argumen tentang ada tidaknya faedah suatu sistem nilai bersifat mengelabui karena ia mengesampingkan pertanyaan tentang status ontologis sistem itu sendiri dengan menganggapnya

telah nyata dan telah berwujud secara efektif serta bekerja sejalan dengan bagaimana ia menampilkan dirinya sendiri. Padahal semuanya tidaklah demikian, atau, paling kurang, tidak sepenuhnya demikian.

Untuk mengembangkan ontologi yang kritis tentang manusia modern sendiri, Foucault melanjutkan dengan mempertanyakan skema-skema penjelasan yang selama ini dianut. Dengan cara itu Foucault mengikuti metode yang digunakan para filsuf sendiri ketika mereka mengembangkan kritik terhadap dogma mapan. Maksud mereka ialah mempermasalahkan hubungan kekuasaan (*power relations*) yang tumbuh dari klaim adanya kebenaran ke-wahyuan dan untuk menyerang dogmatisme yang tampak jelas dalam kewenangan menyatakan kebenaran wahyu itu. Para filsuf memperlihatkan bahwa ajaran “taatilah kemauan Tuhan” selalu berarti “taatilah kemauan mereka yang mengklaim berbicara atas nama Tuhan.” Pada saat bicara atas nama rasio, para filsuf menamakan kembali kapasitas untuk bicara tentang kebenaran dalam pribadi perorangan yang rasional dan berpencerahan. Tetapi, berkenaan dengan ini, taktik mereka menampakkan keterbatasan-keterbatasan historisnya, dan di sinilah pendekatan Foucault menempuh jalan yang berbeda secara radikal. Kritik Foucault tidaklah bersandar kepada kepercayaan tentang kemampuan rasio untuk menghasilkan kebenaran, tetapi mengantarkan kita kepada perhatian terhadap masalah hubungan kekuasaan yang digerakkan oleh penggunaan tindakan yang berorientasi rasio. Dalam klaim tentang kemampuan rasio untuk menentukan jalannya peristiwa itulah Foucault melihat bahaya dogmatisme. Ia menunjukkan bahwa para pemikir Pencerahan gagal memahami jangkauan bahwa percobaan untuk menguniversalkan nilai-nilai dan untuk memberi rasio dan pemikiran ilmiah suatu keabsahan global yang tak bersyarat adalah pada hakikatnya permainan kekuasaan, merupakan teknik-teknik untuk mendesakkan rasionalisasi kepentingan-kepentingan khusus dan untuk mengabsahkan hak-hak istimewa dan sikap-sikap menindas. Foucault beranggapan bahwa idealisasi diskursus dan pen-

dasarannya dalam pengertian-pengertian abstrak serta tema-tema serba-tinggi menghasilkan rezim kekuasaan yang membuatnya dapat mengabaikan kekuatan yang lain berupa strategi-strategi yang secara resminya tidak diteorikan dan tidak diakui namun semuanya itu berlaku dalam konteks historis tertentu. Yang akhir ini meliputi strategi-strategi yang diletakkan oleh jaringan-jaringan institusional dan kedisiplinan tertentu (seperti ordo-ordo Katolik dan persaudaraan sufi Islam). Karena dampak hubungan kekuasaan yang tidak diakui seperti ini tidak muncul dalam representasi resmi tujuan-tujuan dan capaian-capaian masyarakat, orang kemudian tergiring untuk memercayai bahwa eksistensi kita ditentukan oleh kebenaran-kebenaran transendental yang didukung masyarakat, dan lupa bahwa orang sebenarnya dipaksa (atau terpaksa) mewujudkan kebenaran kekuasaan yang diminta oleh masyarakat dan yang diperlukan agar kekuasaan itu dapat berjalan. Orang pun diajari untuk mengatakan, kita harus bicara tentang kebenaran, yakni kebenaran yang berlaku umum, yang mapan, yang menyatu dengan atau mengabsahkan kekuasaan. Kemudian orang pun didorong tanpa mampu melawan untuk mengakui kebenaran itu dan menemukannya. Ideologi yang diletakkan oleh Pencerahan adalah mekanisme yang diperlukan oleh tatanan sosial baru untuk menghasilkan kebenaran-kebenaran dan untuk mengembangkan alasan-alasan pengabsahannya.

## Dilema Indonesia

Jika pascamodernisme adalah sebuah kritik tandas kepada klaim-klaim hasil rasionalitas Zaman Pencerahan, sementara Indonesia adalah sebuah “negara modern” (sesuai dengan *milieu* abad ke-20 dan setia kepada keinginan para pendiri republik), maka dilema Indonesia adalah suatu kenyataan. Ide-ide kenegaraan kita sebagian besar didasarkan kepada beberapa segi terbaik hasil Zaman Pencerahan, meskipun dengan keinsafan tertentu bahwa tidak semua segi

itu dapat diterapkan di negeri kita tanpa sikap cadangan. Dinamika pemikiran para pendiri republik adalah dinamika pemikiran Pencerahan, dengan polemik dan kontroversi yang keras di sekitar ide-ide tentang demokrasi, keadilan sosial, dan keperluan menegakkan negara hukum. Referensi dibuat kepada hampir semua karya Barat modern, dengan tingkat penguasaan yang acapkali cukup mencengangkan.

Adalah suatu kebaikan tersendiri bahwa para pendiri republik menyadari adanya segi-segi kekurangan dalam pemikiran kenegaraan Barat. Kesadaran itu memberi peluang bagi adanya kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran tentang kenisbian budaya. Tapi karena sering membuka kesempatan untuk terjadinya manipulasi berupa strategi untuk menawar ketegaran nilai-nilai yang dianggap umum berlaku di dunia — semisal hak-hak asasi manusia menurut formulasi-formulasi resmi internasional seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia — maka penggunaan argumen kenisbian budaya sering ditanggapi dengan curiga. Menghadapi suasana curiga itu — yang biasanya datang dari kalangan bangsa-bangsa maju berhadapan dengan bangsa-bangsa berkembang — kita biasanya tidak berdaya. Persyaratan-persyaratan pergaulan internasional sebagian besar ditetapkan secara arbitrer oleh bangsa-bangsa maju atas dasar klaim mereka yang kini mulai menjadi “kolot” tentang universalitas rasio yang berpangkal pada Pencerahan.

Pascamodernisme membuka peluang bagi dilancarkannya kritik-kritik mendasar terhadap klaim-klaim universalitas nilai-nilai modernitas yang kini dijunjung tinggi oleh Barat dan, karenanya, oleh dunia. Namun, seperti para pemikir pascamodernisme sendiri telah mengakui dan memang mustahil mengingkari, ada kesinambungan organik antara modernitas dan pascamodernitas. Garis kelanjutan itu telah terlebih dahulu melahirkan situasi dilematis di kalangan mereka sendiri, karena mereka, sementara berkehendak untuk melakukan “dekonstruksi” kemapanan-kemapanan, kemampuan melakukan dekonstruksi itu sendiri masih merupakan fungsi dari modernitas. Dengan kata lain, sebagaimana

telah diisyaratkan pada bagian permulaan, agaknya hanya orang, komunitas atau bangsa modern yang mampu mengembangkan pascamodernisme sebagai suatu kelanjutan wajarnya, mereka yang telah menyertai pandangan Humaniora Pencerahan.

Tetapi mengingkari sama sekali adanya suatu bentuk universalitas, terutama dalam nilai-nilai kemanusiaan, adalah hal yang tidak mungkin. Manusia disebut manusia, sebelum adanya perbedaan antara mereka secara spesifik, adalah karena nilai kemanusiaannya yang meskipun belum tentu, dan pascamodernisme membuktikan tidak, merupakan hasil perumusan Pencerahan, namun pasti ada titik universalitasnya yang merupakan titik-temu semua umat manusia. Segi kemanusiaan yang universal itu adalah segi kemanusiaan yang perennial. Agama Islam, misalnya, mempunyai penegasan tentang hal itu dalam Kitab Sucinya, al-Qur'an, dan yang perennial itu ialah nilai kemanusiaan yang berpangkal pada kejadian asal manusia yang suci (fitrah; Arab: *fiṭrah*), yang membuatnya berwatak kesucian dan kebaikan atau *ḥanīf*.<sup>4</sup>

Fitrah yang *ḥanīf* itu merupakan kelanjutan dari perjanjian primordial antara Tuhan dan ruh manusia, sehingga, menurut pengkalimatan Martin Lings (Abu Bakr Sirajuddin) ruh manusia dijiwai oleh sesuatu yang boleh disebut kesadaran tentang yang Mutlak dan Mahasuci (*Transenden, Munazzah*), kesadaran tentang Kekuatan Yang Mahatinggi yang merupakan Asal dan Tujuan semua yang ada dan yang berada di atas alam raya itu. Kesadaran ini merupakan kemampuan Intelek (*'Aql*), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada di atas dan di luar

---

<sup>4</sup> *Hanīf* ialah sifat kecenderungan alami manusia kepada yang benar, baik, dan wajar. Para ulama Islam berbahasa Inggris menerjemahkannya sebagai "as man by nature upright" — Muhammad Marmaduke Pickthall; "inclined to right opinion, orthodox [in the literal meaning of the Greek words], firm in faith, sound and well-balanced, true" — A. Yusuf Ali; "inclined towards a right state or tendency" — Muhammad Asad). Fitrah yang *ḥanīf* tetap ada selamanya pada manusia, pangkal kebijakan abadi (*sophia perennis, perennial wisdom* — Arab: *al-ḥikmah al-'atīqah, al-ḥikmah al-khâlidah*; Persi: *jâwidâné khard*).

dataran jagad ini. Meskipun kekuatan penuh Intelek ini berkurang oleh kejatuhan manusia dari surga, namun yang tersisa dari sinarnya cukup kuat sehingga tidak mungkin diingkari, seperti ditunjukkan dalam al-Qur'an.<sup>5</sup> Pencerahan tidak dengan tulus mengakui adanya kemanusiaan primordial berdasarkan penciptaan asal yang suci dari Tuhan itu, sehingga humanisme Barat sekarang, menurut pascamodernisme, telah berubah menjadi "*a screen and an alibi for barbarism*" (sebuah tabir dan alibi untuk kebiadaban).<sup>6</sup> [❖]

---

<sup>5</sup> Lihat Martin Lings, *The Eleventh Hour, The Spiritual Crisis of the Modern World in the Light of Tradition and Prophecy* (Longmead, Inggris: Elements Book, 1987), h. 1. Firman yang dimaksud ialah "*Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari anak turun Adam, dari tulang punggung mereka, keturunan mereka, dan meminta mereka persaksian atas diri mereka sendiri: 'Bukankah Aku ini Tuhanmu sekalian?!' Mereka berkata: 'Benar, kami bersaksi!' (Ini agar janganlah) kamu nanti berkata pada hari Kiamat: 'Sesungguhnya kami lupa akan hal itu,'*" (Q 7:172).

<sup>6</sup> Racevskis, *op. cit.*, h. 4.